

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Era otonomi dewasa ini, masing-masing daerah diberikan kebebasan dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing, di mana pemberian otonomi daerah ini difokuskan pada tingkat kabupaten dan kota, sehingga masing-masing unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut untuk lebih aktif dan transparan dalam kinerja dan pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melahirkan sebuah paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu meletakkan otonomi yang penuh, luas, dan bertanggungjawab pada daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang tersebut juga melahirkan nuansa baru yaitu pergeseran kewenangan pemerintah dari sentralistik ke pemerintah yang desentralistik partisipatoris.

Otonomi daerah yang seluas-luasnya ini membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk reformasi manajemen keuangan daerah, sehingga ada dua alasan mengapa reorientasi di bidang ini diperlukan :

- 1) Pelimpahan berbagai wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks, 2) Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban.

Tujuan dari adanya program otonomi daerah itu sendiri adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi, maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini dapat ditempuh melalui peningkatan yang menyangkut prestasi kerja aparatur pemerintah daerah.

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparatur pemerintah daerah. Unit-unit kerja organisasi publik diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan. Kinerja dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang tertuang dalam Inpres No. 7 tahun 1999 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijaksanaan sesuai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Secara umum, kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting, guna evaluasi dan perencanaan masa depan.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang diamanatkan rakyat, pemerintah harus mempunyai rencana yang matang dalam mencapai tujuan. Salah satu tugas pemerintah dalam keuangan adalah membuat rencana

anggaran keuangan yang dituangkan dalam anggaran (Abdul, 2002 dalam Ramadanil, 2013). Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja yang telah dianggarkan secara periodik. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan kerjasama dan partisipasi yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan pimpinan dalam penyusunan anggaran.

Partisipasi penyusunan anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Brownell, 1982 dalam Falikhatun, 2007 dalam Mediaty, 2010). Menurut Argyris (1952) dalam Mediaty (2010) menyarankan bahwa kontribusi terbesar dari kegiatan penganggaran terjadi jika bawahan diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan prestasi (kinerja) yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fibrianti dan Riharjo (2013), Ramadanil (2013), Adamy (2010), Mediaty (2010), Al Azhar L et al., (2009), Jalaluddin dan Bahri (2009) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Yenti (2013) menunjukkan

bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja organisasi.

Keberhasilan dalam mengelola suatu organisasi juga tidak terlepas dari faktor kepemimpinan dan sikap bawahan dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Peran kepemimpinan ini merupakan suatu karakteristik yang penting dalam suatu organisasi. Perubahan yang semakin pesat, serentak, dan pervasive, menuntut personel untuk memiliki kompetensi dalam memimpin organisasinya. Untuk itu seorang pemimpin juga harus dapat mengembangkan gaya kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja para karyawannya.

Gaya kepemimpinan (*leadership styles*) merupakan pola perilaku konsisten yang diterapkan pemimpin dengan melalui orang lain (Fleishman dan Peters, 1962 dalam Mediaty, 2010). Menurut Robbins (2003) dalam Hakim (2011) menyatakan bahwa faktor kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai karena kepemimpinan yang efektif memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan organisasi sebagai instansi pelayanan publik. Dengan demikian, gaya kepemimpinan dapat menjadi pedoman yang baik dalam peningkatan kinerja karyawannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhardjo (2013), Hakim (2011), Adamy (2010), dan Mediaty (2010) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Al Azhar L et al., (2009) menunjukkan

hasil penelitian yang berbeda yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh negatif signifikan terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemda.

Selain gaya kepemimpinan, keberhasilan suatu organisasi tergantung kepada karyawan yang bekerja dalam organisasi yang tercermin dari kinerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan tersebut. Kinerja dari karyawan dapat ditingkatkan melalui motivasi yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. Menurut Handoko (2000) dalam Hakim (2011), motivasi didefinisikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.

Motivasi dapat mendorong segala potensi yang ada, menciptakan keinginan yang tinggi, dan meningkatkan kebersamaan masing-masing pihak dalam bekerja menurut aturan yang ditetapkan. Motivasi ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya akan melakukan pekerjaannya tersebut secara optimal untuk mencapai target yang telah ditentukan institusinya dan secara sukarela akan memperbaiki kesalahannya jika kinerjanya rendah. Sebaliknya, karyawan yang memiliki motivasi yang rendah, dia tidak akan optimal dalam menjalankan pekerjaannya tersebut dan tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan institusinya. Karyawan yang memiliki motivasi yang rendah juga kurang menyukai memperbaiki kinerjanya secara sukarela apabila kinerjanya rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yenti (2013), Ramadanil (2013), Suhardjo (2013), Idris (2012), Zirman et al., (2010) menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2011) menunjukkan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menguji kembali mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah karena masih terdapat hasil penelitian yang belum konsisten dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Di samping itu, juga untuk menguji apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mediaty (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada penambahan variabel independen yaitu motivasi dan menggunakan daerah pemilihan sampel yang berbeda yaitu Pemerintahan Kabupaten Purworejo, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH” (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Purworejo)**”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan satu variabel dependen yaitu kinerja satuan kerja perangkat daerah dan tiga

variabel independen yaitu partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, dan motivasi.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah?
3. Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
2. Untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
3. Untuk mengetahui apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan tambahan dalam literatur pembelajaran akuntansi khususnya mata kuliah di sektor publik terutama dalam pembahasan tentang Partisipasi Penyusunan Anggaran, Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

2. Bidang Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi SKPD Kabupaten Purworejo untuk dijadikan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengukur sejauhmana kinerja SKPD guna untuk mencapai pemerintahan yang baik.